

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 April 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap**BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR****UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DRS. MUHTAR, MM**
2. Jabatan : **WAKIL BUPATI**
3. NHK : **547909**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.023.817.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 257 m2/257 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 15.401 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 150.401.000
4. Tanah Seluas 12.000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah Seluas 1.694 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SELAYAR, HASIL SENDIRI Rp. 108.416.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 270.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH / MINI BUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP NGN ABS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, YAMAHA BY8 A/I Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOBIL, TOYOTA SIENTA 1.5 V CVT (NSP170R-MWYOKD) Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	11.165.938
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.310.982.938
III. HUTANG	Rp.	171.683.552
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.139.299.386

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.